

**Proceeding**  
**Seminar Nasional**

**Pendidikan untuk Perubahan  
Masyarakat Bermartabat**



Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
27 September 2014

PROCEEDING  
Seminar Nasional  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
27 September 2014

PENDIDIKAN UNTUK PERUBAHAN MASYARAKAT BERMARTABAT

ISBN: 978-602-7981-44-7

Hak Cipta dilindungi Undang-undang memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun, sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizing penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

Judul Buku:

PENDIDIKAN UNTUK PERUBAHAN MASYARAKAT BERMARTABAT

**Penyunting**

Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum  
Dr. Sugeng Bayu Wahyono  
Dr. Arief Rahman, M.Pd.  
Nanang Erma Gunawan, M.Ed.

**Layout dan Cover**

Nanang Erma Gunawan, M.Ed.

**Penerbit:**

UNY PRESS

Kompleks Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Karangmalang Yogyakarta, 55281

Telp. (0274) 589346

Email: unypress.yogyakarta@gmail.com

ii

# REDEFINISI MAKNA HISTORIS BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI GERAKAN PERUBAHAN SOSIAL

Oleh Fathur Rahman  
Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UNY  
Email: fathur@uny.ac.id

## PENDAHULUAN

Perkembangan kebijakan dan implementasi praktis layanan bimbingan dan konseling dalam suasana pendidikan telah berkembang sedemikian pesat. Salah satu penanda penting dari perkembangan tersebut adalah pengakuan konselor sebagai bagian dari tenaga pendidik dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan penataan kualifikasi dan kompetensi konselor yang tertuang dalam Permendiknas No. 27 Tahun 2008. Kehadiran perangkat legal tersebut setidaknya-tidaknya semakin menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling tidak lagi hanya sekedar tugas sampingan yang bersifat inheren dalam unjuk kerja guru wali kelas ataupun guru matapelajaran sebagaimana terimplementasi dalam Kurikulum 1975 dan SK Menpan No. 26 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa tugas pokok guru selain mengajar juga memberikan layanan bimbingan.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa dalam perkembangannya sampai saat ini, bimbingan dan konseling sebagai profesi dari segi dinamika kebijakan dan implementasi praktis telah berjalan cukup baik menuju puncaknya dan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Namun demikian, tampaknya sulit untuk menulis ulang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, karena dinamika perubahan dari segi legalitas dan kebijakan saja tidaklah cukup memadai untuk mewarnai gambaran komplis tentang bimbingan dan konseling, apakah ia sebagai gerakan perubahan (seperti yang terjadi di Amerika Serikat) ataukah murni sebagai suatu bidang interdisipliner.

Kegelisahan ini muncul sebagai bentuk gugatan kritis terhadap perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia yang lebih banyak berorientasi pada pemenuhan logika formal semata dibandingkan pengembangan logika materialnya. Logika formal dimaksud adalah bentuk atau format utama yang membingkai bagaimana bimbingan dan konseling akan dilaksanakan. Adapun logika material yang dimaksud terkait dengan kesadaran akademisi dan praktisi bimbingan dan konseling terhadap problem sosial-kemanusiaan yang tengah dihadapi dan senantiasa berubah dari waktu ke waktu, termasuk pula kemampuan konselor atau guru BK pada umumnya dalam menguasai esensi materi bimbingan dan konseling dengan cakupan yang bersifat lintas-disiplin.

Di berbagai forum dan kegiatan bimbingan teknis untuk peningkatan kemampuan guru bimbingan dan konseling, tema sentral yang diangkat lebih banyak berkuat pada persoalan bagaimana keterampilan administratif-manajerial-evaluatif

yang harus dimiliki, bagaimana menyusun format pelayanan bimbingan dan konseling, bagaimana tata-laksana prosedural layanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada siswa di sekolah, dan lain-lainnya. Sementara di sisi lain, keluasan-kedalaman wawasan dan pengetahuan konseptual-teoretis tentang dinamika psikososial dari problem dan kebutuhan perkembangan individu justru tidak mendapatkan perhatian serius, bahkan cenderung terabaikan. Gegap-gempita perdebatan dalam ruang diskusi dari kalangan profesional bimbingan yang mengkaji secara serius dan merespon secara cepat atas *trending topic* permasalahan yang muncul tidak terasa gaungnya selama ini.

Kemajuan bimbingan dan konseling yang telah terjadi sampai dengan saat ini menyisakan beberapa pertanyaan penting, yakni apakah bimbingan dan konseling telah terimplementasi dengan baik sesuai dengan gagasan historis yang melatarbelakangi kelahirannya itu sendiri? Ataukah elan vital utama dari bimbingan dan konseling telah lama menguap seiring perkembangannya dan menjadikannya tak lebih sebagai alat instrumental-komplementer dalam perkembangan pendidikan yang semakin berwatak neo-liberal?

Dalam paper ini, penulis mencoba memaparkan secara ringkas jawaban terhadap permasalahan di atas yang mencakup tentang, 1). Latar historis dan sosial kelahiran gerakan bimbingan dan kontribusi Frank Parsons sebagai Bapak Bimbingan dan Konseling terhadap arus besar perubahan sosial, dan 2). Identifikasi dinamika perubahan sosial yang telah dan sedang terjadi di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan bimbingan dan konseling.

## **WARISAN FRANK PARSONS; KONSELOR SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL**

Di Amerika Serikat, latar kelahiran bimbingan dan konseling di awal abad 20 bermula dari keprihatinan yang mendalam terhadap carut-marutnya perkembangan kepribadian generasi muda yang terkena dampak gelombang besar industrialisasi di kota-kota besar; jumlah siswa *drop-out* meningkat (kaum muda lebih memilih bekerja ketimbang sekolah, sementara keterampilan kerja tidak memadai), pergeseran nilai dalam keluarga dan masyarakat, urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota, gelombang imigrasi, dan problem-problem sosial yang lain (Gysbers & Henderson, 2006; Dedi Supriadi, 2004). Bimbingan dan konseling pertama kali tumbuh dan berkembang sebagai bentuk perhatian kemanusiaan yang besar (*humanitarian concern*) untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang mengalami penderitaan akibat revolusi industri yang terjadi di akhir tahun 1800-an.

Kenyataan tersebut akhirnya memicu tumbuhnya layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu gerakan sosial yang selaras dengan gerakan kemajuan (*progressive movement*) yang berkembang dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat pada saat itu yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pendidikan saat itu, seperti Frank Parsons, Charles Merrill, Meyer Blommfield, Jesse B. Davis, Anna Reed, E. W. Weaver dan David Hill (Gysbers & Henderson, 2006; Gunawan, 2001). Para tokoh tersebut sama-sama memandang secara kritis bahwa gelombang revolusi industri yang membawa dampak negatif bagi perkembangan generasi muda harus dicegah. Ginter

(Brown & Trusty, 2005) mengatakan bahwa pendek kata gerakan konseling saat itu muncul di tengah-tengah periode turbulensi sosial yang terjadi dalam masa pergantian abad dan satu periode yang ditandai oleh perubahan-perubahan besar yang menyebabkan terjadinya pergeseran cara tiap-tiap individu dalam memandang dirinya sendiri dan orang lain.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Nugent dan Jones (Brown & Trusty, 2005), sebagian besar pionir awal dalam gerakan konseling diidentifikasi sebagai pembaharu sosial (*social reformer*) dan advokat sosial (*social advocates*). Contoh yang paling nyata adalah Frank Parsons, pendiri gerakan bimbingan. Apresiasi dan pengakuan terhadap kerja intelektual yang telah dilakukan oleh Parsons secara khusus diulas dalam Jurnal *The Career Development Quarterly* Edisi September 2001 Volume 50/1 oleh Donald G. Zytowski dengan judul "*Frank Parsons and the Progressive Movement*" dan Karen M. O'Brien dalam tulisannya yang diberi tittle "*The Legacy of Parsons: Career Counselors and Vocational Psychologists as Agents of Social Change*". Bahkan, sisi kehidupan pribadi dan keseharian Frank Parsons oleh Mark Pope dan Maria Sveinsdottir diulas secara terbuka dan terang-terangan sebagai profil biografis dalam *Journal of Counseling and Development*, Winter 2005; 83/1 dengan tajuk yang berjudul "*Frank, We Hardly Knew Ye: The Very Personal Side of Frank Parsons*".

Parsons adalah seorang yang memiliki kehidupan karir yang berwarna dalam disiplin yang beragam. Ia pernah menjadi pengacara, pemegang gelar *engineer*, seorang professor dan guru, pembaharu sosial yang mendedikasikan dirinya terhadap pertumbuhan anak muda di zamannya. Parsons bahkan dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya, penulis yang persuasif, aktivis yang tak kenal lelah, dan seorang intelektual besar. Parsons adalah advokat sosial bagi anak muda, para wanita, orang-orang miskin dan kurang beruntung yang mendidik dengan prinsip kerjasama, cinta keadilan, dan benci kepada opresi dan diskriminasi (O'Brien, 2001; Pope & Sveinsdottir, 2005).

Layanan bimbingan yang digerakkan oleh Parsons pada masanya saat itu lebih banyak berorientasi pada pemberian bantuan psiko-pedagogis terhadap masyarakat luas, bukan dalam *setting* pendidikan formal. Puncak dari aktivitas tak kenal lelah yang telah dilakukan oleh Parsons lalu dilembagakan secara formal melalui pendirian Biro Pekerjaan (*Vocational Bureau*) di Boston tahun 1908. Anak muda pada zaman tersebut banyak yang mengalami kegamangan dalam mempersiapkan pilihan karir. Parsons mengambil inisiatif untuk membantu anak-anak muda tersebut untuk membuat keputusan karir yang lebih rasional dengan cara pengintegrasian tiga faktor, yakni membangun struktur pemahaman tentang diri, struktur pemahaman tentang lingkungan pekerjaan, dan membuat keputusan rasional berdasarkan dua faktor sebelumnya.

Sejarah juga telah mencatat bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Parsons juga telah melampaui apa yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh lainnya pada saat itu. Parsons bahkan terlibat sangat aktif dalam mengadvokasi perjuangan kaum buruh di Amerika dalam hal penerapan 8 jam kerja sebagai jam efektif. Parsons juga dikenal sebagai pendukung utama dalam perjuangan hak-hak perempuan yang terabaikan. Ia

pernah mengugat kontradiksi yang terjadi dalam masyarakat saat itu melalui tulisannya yang menggugah "*Shall Our Mother, Wives, and Sisters Be Our Equals or Our Subjects?*" Ia menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dalam situasi dan kondisi apapun dan perbedaan jenis kelamin bukanlah alasan yang tepat untuk memberi perlakuan yang berbeda (Pope & Sveinsdottir, 2005). Parsons juga tercatat dalam sejarah sebagai professor yang telah ikut mendonasikan harta bendanya untuk perjuangan penegakan hak-hak kaum perempuan (Pope & Sveinsdottir, 2005).

Senada dengan fakta historis yang terungkap di atas, Traxler bahkan berkesimpulan bahwa salah satu factor yang mendorong munculnya bimbingan dan konseling sebagai suatu gerakan sosial, yaitu perkembangan gerakan filantropik dan humanisme (Yusuf Gunawan, 2001). Dari sudut filantropik, pemberdayaan yang dilakukan oleh Parsons dalam tahap awal kemunculan bimbingan pekerjaan merupakan manifestasi nyata pengakuan terhadap eksistensi individu sebagai entitas manusia dengan segala atribut yang melekat. Pengakuan tersebut muncul dalam bentuk ungkapan perhatian dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang tertindas. Akar perjuangan yang dilakukan oleh Parsons berakar kuat dalam tradisi filantropik yang sangat mengasumsikan bahwa kecintaan terhadap kemanusiaan harus diwujudkan secara nyata dalam bentuk dukungan dan bantuan terhadap orang lain. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian masyarakat sipil yang dilakukan dalam dua bentuk varian besar, yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial (Zainal Abidin, 2012).

Apa yang telah dilakukan oleh Parsons dengan gagasan pembumian dan massifikasi gerakan bimbingan tentunya lebih banyak dilandasi oleh semangat filantropik dalam varian yang kedua, yakni filantropi keadilan sosial. Model filantropi tradisional hanya sebatas pada praktik membantu orang lain dalam wujud karitatif atau memberi donasi berupa harta benda. Sedangkan filantropi keadilan sosial sangat menekankan pada aspek pendampingan dan pemberdayaan jangka panjang, bergerak di ranah makro, dan menyelesaikan problem di tingkat struktur, serta mengubah sistem yang kurang berkeadilan (Zainal Abidin, 2012).

Pengintegrasian antara pendekatan mikro dan makro dalam memahami dan mengintervensi problem psikososial ini, seperti yang dilakukan oleh Parsons, adalah ciri khas pendekatan sistem, yakni model pemahaman dan respon yang dikembangkan untuk menangani problem individu, komunitas dengan lingkungan sosialnya (Orford, 1992). Cara-cara penanganan yang bersifat sosiopsikologis dapat ditujukan untuk problem-problem yang bersifat mikro maupun makro. Pada level mikro, problem-problem yang muncul lazimnya dapat diamati pada hubungan antara orangtua dan anak dalam keluarga, model interaksi kelompok kecil, struktur keorganisasian, relasi antarstakeholder di sekolah atau lingkungan kerja, dan lain-lain. Sedangkan pada level makro, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, problem-problem yang muncul berkaitan erat dengan relasi masyarakat dengan kelas sosialnya atau relasi warga dengan elit yang berkuasa, model distribusi kekuasaan yang terdapat di dalamnya.

Jika pendekatan mikro-makro ini diterjemahkan dalam konteks tujuan konseling, maka pada dimensi mikro, konseling secara konservatif bertujuan

membantu individu agar mampu menyesuaikan diri (beradaptasi) dalam lingkungan. Kegagalan kegiatan dan program konseling, baik di sekolah maupun di masyarakat selama ini disebabkan oleh aksentuasi yang berlebihan terhadap pencapaian tujuan konseling dalam dimensi mikro. Tidak mustahil yang terjadi justru kita memaksa klien untuk memperbaiki dirinya sesuai kehendak lingkungan dan norma-norma di sekelilingnya. Padahal, bisa jadi lingkungan (masyarakat) dan norma yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri menyimpan kompleksitas problem yang jauh lebih berat ketimbang individu itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, alih-alih membantu individu yang terjadi bisa jadi "memaksa" individu mengikuti kehendak lingkungan yang tidak beres.

Pencapaian tujuan pada dimensi mikro tersebut perlu diperluas cakupannya sampai pada dimensi meso dan makro. Pada tataran meso, logikanya dibalik; konseling ditujukan untuk membantu lingkungan agar dapat mengakomodasi (memenuhi) kebutuhan dan hak-hak dasar individual. Fokus ubahan dalam dimensi ini bukan lagi individu sebagai klien, namun lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai ruang hidup si individu. Pada dimensi yang lebih luas (dimensi makro), konseling diarahkan pada peran kelembagaan konseling untuk berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha mempengaruhi kebijakan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan komunitas dan individu yang ada di dalamnya.

Konsep ini sejalan dengan ide mencangkokkan pendekatan advokasi dalam program konseling perkembangan (Orford, 1992; Dell Orto & Marinelli, 1995). Studi yang dilakukan oleh Williams (Orford, 1992; 248) adalah ilustrasi terbaik dari cikal bakal pendekatan advokasi dalam pengembangan komunitas. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa di Exeter, Inggris, sekelompok ahli yang sedang terlibat dalam pemberdayaan komunitas telah memfasilitasi komunitas untuk menemukan dan mengelola keinginan dan harapan mereka tentang masa depan dan bukannya mengidentifikasi problem dan mempreskripsikan intervensi perbaikan (*remedial treatment*) komunitas. Peran kelompok ahli ini kemudian beralih fungsi tidak lagi sekedar menjadi terapis bagi kelompok, tetapi juga mengembangkan keterampilan mendengarkan, sebagai analist, fasilitator kelompok, penyaji informasi, dan lain sebagainya.

Fakta historis tentang kelahiran bimbingan dan konseling sebagai respon cepat atas perubahan-perubahan besar yang terjadi di akhir abad 19 dan memasuki awal abad 20 tersebut semakin memperkuat keyakinan penulis bahwa watak bimbingan dan konseling pada mulanya adalah suatu gerakan perubahan untuk menjawab problematika saat itu. Keberhasilan para pionir awal yang memobilisasi bimbingan dan konseling sebagai sebuah gerakan sosial tampaknya perlu dimaknai ulang dalam kaitannya terhadap arus besar perubahan sosial yang tengah terjadi dewasa ini, terutama dalam konteks keindonesiaan.

### **BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM ARUS BESAR PERUBAHAN SOSIAL**

Dalam rangka menjadi seorang konselor yang efektif, penguasaan keterampilan praktis dalam mengelola dan memberikan layanan bimbingan dan konseling

dipandang tidak lagi mencukupi, jika tidak didasari oleh pemahaman konseptual dan kesadaran kontekstual tentang perubahan-perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Pemahaman dan kesadaran tentang perubahan sosial bersifat sangat fundamental dalam upaya mempertajam layanan yang diberikan, terutama pelayanan yang berorientasi pada modifikasi lingkungan sosial yang ada di sekitar klien. Bahkan, Blocher (1974) menegaskan bahwa seorang konselor senantiasa berhadapan dan bekerja dengan individu-individu yang bergulat dengan ketidakpastian masa depan. Seorang konselor akhirnya dituntut untuk mampu “bergulat” dalam kehidupan dunia yang selalu berubah (*a changing world*) dan memahami besaran dan intensitas perubahan yang terjadi yang berdampak pada individu dan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Dedi Supriadi (2004; 224) bahwa setiap perubahan melahirkan kondisi tidak seimbang (disekilibrium) dalam masyarakat yang kemudian melahirkan kebutuhan-kebutuhan baru, harapan-harapan baru dan keinginan-keinginan baru yang [*pada akhirnya-pen.*] menciptakan kondisi ekuilibrium dalam masyarakat.

Pemahaman dan kesadaran tentang arus besar perubahan sosial tersebut mencakup isu-isu tentang bagaimana dampak perkembangan ekonomi, perubahan teknologis, struktur pekerjaan yang semakin tersegregasi, pergeseran nilai dan peran keluarga dalam masyarakat, terjadinya ledakan populasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika bimbingan dan konseling sebagai gerakan dan basis terapan dari kajian-kajian keilmuan yang bersifat multidisipliner sangat membutuhkan pengetahuan substantif, seperti sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya, dan ekonomi (Blocher, 1974).

Perkembangan bimbingan dan konseling sebagai gerakan yang antisipatif terhadap perubahan sosial di Amerika tidak hanya berhenti di tahun-tahun awal kelahirannya. Gerakan bimbingan dan pelayanan konseling yang semakin kokoh dalam dunia pendidikan kembali memasuki fase reformatif di tahun 1980-an seiring terjadinya gelombang reformasi sekolah pada saat itu (Brown & Trusty, 2005). Pada tahun 1983, Komisi Nasional Pendidikan di Amerika Serikat saat itu mempublikasikan rekomendasi yang membuat publik tersentak kaget; *A Nation at Risk and The Imperative of Educational Reform* (Negara dalam Bahaya; Pentingnya Reformasi Pendidikan). Beberapa komisioner pendidikan menjelaskan bahwa siswa-siswa di Amerika Serikat telah tertinggal jauh dari siswa-siswa yang ada di Eropa Barat dan negara-negara pasifik lainnya dalam hal prestasi akademik. Fenomena tersebut disebabkan oleh rendahnya standar akademik yang harus dicapai, sebagian besar guru tidak memiliki inspirasi, dan kurikulum yang tidak berkembang optimal (Brown & Trusty, 2005). Dalam hal moral, sekolah-sekolah menengah di Amerika Serikat berhadapan dengan tingginya kekerasan di kalangan pelajar, kenaikan rata-rata kehamilan siswa di luar nikah, dan sebagainya. Inilah kenyataan yang terjadi di negeri yang dianggap sebagai kampiun dalam demokrasi dan pendidikan. Di tengah kecaman dunia internasional, terpilihnya George W. Bush pada tahun 2000 setidaknya-tidaknya memberi angin segar bagi masa depan reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Di masa Bush, kongres AS telah mengamandemen Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah (*Elementary*



*and Secondary Act*) dan melahirkan UU yang berpihak pada anak (*No Child Left Behind Act*).

Sampai dengan diterbitkannya UU tersebut, Gysbers mengamati bahwa sebagian besar konselor sekolah di Amerika Serikat lebih banyak disibukkan oleh dan menghabiskan waktu untuk tugas dan kewajiban yang tidak profesional. Penelitian yang dilakukan oleh ASCA (*American School Counselor Association*) menunjukkan bahwa sebagian besar konselor sekolah menghabiskan waktu antara 1 sampai 88% dari keseluruhan waktu bekerja hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak profesional dan tidak ada kaitannya langsung dengan layanan bimbingan dan konseling (Brown & Trusty, 2005). Tugas-tugas yang tidak profesional tersebut menurut ASCA, seperti kegiatan pendaftaran dan mengatur penjadwalan siswa baru (*registering and scheduling*), menangani problem kedisiplinan siswa di sekolah, pengaturan berlebihan dalam hal seragam sekolah, mengerjakan tugas klerikal dan administratif, bahkan sampai dengan menggantikan tugas guru dalam mengajarkan mata pelajaran atau subjek tertentu di luar bidang layanan bimbingan dan konseling. Atas dasar problematika yang terjadi di tengah-tengah arus reformasi pendidikan tersebut, tema bimbingan dan konseling komprehensif mulai berkembang luas sampai dengan sekarang.

Dalam perkembangan berikutnya, tema advokasi juga mewarnai periode kepemimpinan Loretta Bradley dalam Asosiasi Konseling Amerika selama kurun waktu satu tahun. Bradley (Kiselica & Robinson, 2001) di waktu itu sangat terkenal dengan jargon yang diusungnya, yaitu "*Advocacy; A Voice for Our Clients and Communities*". Tema advokasi yang diusungnya merefleksikan suatu ekspansi gerakan profesi bantuan konseling dari fokus tradisional yang sangat peduli pada faktor-faktor intrapsikis klien (mikro dan meso) menuju fokus baru yang lebih berorientasi pada pengaruh faktor-faktor ekstrasikis (exo dan makro) terhadap kesejahteraan psikologis klien (Kiselica & Robinson, 2001; Galassi & Akos, 2004).

Untuk memahami makna advokasi dalam konteks pendampingan psikologis, pengertian advokasi terhadap klien dan komunitas perlu dibedakan dari pemahaman advokasi secara umum (Galassi & Akos, 2004). Dalam pendampingan klien, advokasi merupakan suatu proses aktif yang didisain bagi lingkungan agar lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan klien (Galassi & Akos, 2004; Dell Orto & Marinelli, 1995). Sementara, pengertian advokasi dalam bentuknya yang umum dapat dipahami sebagai advokasi yang berbasis pada pendekatan sosial dan politik. Dalam pendekatan yang kedua ini, gerakan membantu (*helping profession*) diarahkan pada upaya-upaya peningkatan keterlibatan peran pendamping (konselor) dalam mempengaruhi kebijakan sistem sosial dan politik. Pada akhirnya, sistem ini dapat lebih responsive terhadap keseluruhan kebutuhan komunitas (Galassi & Akos, 2004). Keunikan aksi advokasi ini terletak pada perannya yang tidak hanya sebatas melakukan intervensi individual dan lingkungan klien semata-mata, tetapi juga advokasi berperan penting dalam mengimplementasikan pendampingan multisistem (Fathur Rahman, 2005). Intervensi yang diterapkan oleh konselor tidak lagi sebatas pada intervensi individual dan kelompok, namun advokasi sosial menuntut konselor untuk lebih

mengembangkan intervensi organisasional dalam membantu klien keluar dari krisis hidupnya.

### **BK DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

Upaya untuk mengkaji eksistensi bimbingan dan konseling di Indonesia bukanlah perkara mudah. Tampaknya sampai saat ini belum ada suatu kajian dan riset yang cukup komprehensif yang memetakan tentang apa dan bagaimana latar belakang historis profesi bimbingan dan konseling, serta tonggak perubahan dan momentum penting apa saja yang menjadi penanda penting lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia. Kegelisahan tersebut diungkap secara nyata oleh almarhum Profesor Dedi Supriadi, guru besar bimbingan dan konseling UPI, Bandung dalam pernyataan berikut ini;

*"Dalam konteks konseling di Indonesia, yang bisa kita lakukan adalah melacak momentum-momentum penting dalam masyarakat Indonesia dan khususnya dalam pendidikan yang membawa lahirnya konseling di Indonesia. Jadi kalau selama ini pendekatan kita untuk memberikan justifikasi terhadap eksistensi konseling di sekolah atau lebih luas lagi dalam sistem pendidikan kita lebih banyak mengacu kepada pertanyaan kapan konseling masuk di Indonesia, kemudian masuk dalam kurikulum 1968 dan 1975 dan 1984, maka itu belum cukup." (Dedi Supriadi, 2004; 226)*

Pernyataan tersebut harus dimaknai sebagai otokritik terhadap perubahan progresif yang terjadi dalam profesi bimbingan dan konseling. Penulis sendiri mencermati bahwa berbagai forum dan kegiatan ilmiah yang digelar, baik di tingkat lokal, provinsial, dan nasional, serta kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas konselor atau guru bimbingan dan konseling lebih banyak berorientasi pada aspek kebijakan administratif, walaupun sebagian kecil diantaranya sudah jauh lebih baik, karena mengarah pada perbaikan keterampilan profesional dalam kaitannya dengan cara memberikan layanan bimbingan dan konseling. Namun demikian, itu semua juga belumlah cukup. Fondasi filosofis dan historis yang menjadi sandaran utama kebijakan administratif dan keterampilan teknis tadi masih terlihat sangat rapuh. Profesional ahli di bidang bimbingan dan konseling kita dewasa ini ibarat orang sehat yang berjalan ke depan dengan kondisi inderawi yang tidak berfungsi maksimal. Seorang konselor, guru bimbingan dan konseling haruslah memiliki kesadaran filosofis dan historis tentang latar mengapa bimbingan dan konseling perlu menjadi *problem solver* terhadap berbagai persoalan disorientasi perilaku yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Dedi Supriadi mengemukakan;

*"Kita perlu menunjukkan –agar lebih eksplisit dan meyakinkan – bahwa memang dalam perjalanan pendidikan di Indonesia, ada momentum-momentum yang mengundang perlunya konseling di sekolah. Sebagai contoh, bisa diuraikan soal ekspansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan, ledakan penduduk, pertumbuhan kota-kota, kesenjangan tingkat sosial-ekonomi, revolusi informasi, pergeseran dalam fungsi-fungsi keluarga, dll*

*yang semuanya membawa-serta perubahan pada perilaku siswa di sekolah dan harapan-harapan masyarakat pada sekolah. Pendekatan macam ini diperlukan karena selama ini proses difusi ide-ide tentang konseling di sekolah lebih banyak dari "atas ke bawah" daripada sebaliknya, dengan berbagai akibatnya yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan profesi konseling itu sendiri" (Dedi Supriadi, 2004; 226)*

Kutipan di atas, walaupun tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perubahan-perubahan tersebut memengaruhi profesi bimbingan dan konseling, setidaknya-tidaknya telah menjadi pembuka wacana untuk mengangkat derajat eksistensial bimbingan dan konseling sebagai profesi layanan yang mampu menangkap *mainstream* perubahan yang tengah terjadi dan memberi arah penyelesaian yang sistematis terhadap masalah-masalah yang ada. Berikut ini merupakan gambaran kongkrit dari arus besar perubahan, baik yang sedang maupun akan kita hadapi di masa-masa mendatang. Beberapa tantangan perubahan sosial dimaksud, yaitu;

a. Perubahan Kultur Politik dan Reformasi Pendidikan

Satu-satunya dinamika perubahan sosial yang dapat menjelaskan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia adalah gerakan reformasi pendidikan. Meskipun tidak ada penanda eksplisit di dalam aturan perundangan, sistem dan kebijakan pendidikan di tanah air yang mengatakan bahwa kita tengah memasuki era reformasi dalam bidang pendidikan, setidaknya-tidaknya penanda implisit yang dapat dikemukakan di sini, yaitu momentum perubahan politik di tahun 1998 menjadi bibit awal tumbuhnya semangat reformasi dalam berbagai bidang, tidak terkecuali pendidikan. Keterkaitan antara perubahan kultur sosial-politik yang bersifat satu paket dengan tuntutan harus terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan juga diutarakan oleh H. A. R. Tilaar (1999). Beliau mengatakan bahwa nilai-nilai reformasi untuk membentuk masyarakat baru Indonesia hanya dapat terwujud apabila pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari paket reformasi total dalam masyarakat (H. A. R. Tilaar, 1999; 6).

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 dan bahkan sejak program-program Repelita dimulai tahun 1969/1970 tatkala pembangunan pendidikan mulai dilaksanakan dengan serius, baru 4-5 tahun terakhir ini (2005-2009) sejak reformasi bergulir tahun 1998 merupakan periode yang paling padat perubahan (Dedi Supriadi, 2004). Beberapa perubahan yang mendominasi panggung pendidikan selama tahun-tahun tersebut, seperti Pendidikan Berbasis Luas, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, Ujian Akhir Nasional (UAN) yang menggantikan EBTANAS, pembentukan Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Tahun 2003 bisa jadi merupakan salah satu tahun puncak perubahan tersebut dengan lahirnya UU No 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu diikuti dengan UU Guru dan Dosen, dan berbagai perangkat peraturan pemerintah dan menteri yang memberi penjabaran lebih luas tentang berbagai perubahan-perubahan dimaksud.

Belakangan mulai muncul label-label perubahan yang berseliweran tanpa terkendali; manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), peningkatan mutu berbasis sekolah (*school-based quality improvement*), belajar berbasis komputer (*learning-assisted computer*). Sepanjang tahun 2006 dan akhir 2009 ini, energi seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan terkuras habis dalam menghadapi proyek nasional dalam skala besar yang melibatkan berbagai kepentingan; Sertifikasi Guru dalam berbagai varian dan bentuk (Fathur Rahman, 2009).

b. Ledakan Populasi dan Bonus Demografi

Sejumlah pejabat dan akademisi selama beberapa tahun terakhir ini mengatakan bahwa pada tahun 2020-2030 diperkirakan akan terjadi fenomena nasional yang kerap disebut dengan istilah Bonus Demografi. Istilah ini mengacu pada pada hasil proyeksi penduduk dalam *UN World Population Prospects*. Bonus demografi dimaksud adalah meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) saat ini yang diikuti penurunan proporsi penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang menyebabkan penurunan rasio ketergantungan. Jika dibuat proyeksi sederhana (Sunaryo Kartadinata, 2012), mereka yang akan menduduki posisi usia produktif pada 15-20 tahun yang akan datang adalah mereka yang pada saat ini berusia antara 0-40 tahun. Data yang diperoleh Badan Pusat Statistik di tahun 2010 menunjukkan bahwa komposisi penduduk Indonesia sekarang ini saja didominasi oleh penduduk usia muda, jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 1,49%, tidak terbayangkan betapa fantastisnya kenaikan signifikan jumlah penduduk usia muda pada tahun 2035-2045.

Berdasarkan data statistik tersebut, bonus demografis bisa menjadi peluang dan tantangan jika dikelola secara efektif, namun dapat berubah menjadi ancaman jika tidak ada *grand-design* pendidikan yang tepat untuk pembangunan potensi insani yang kita miliki. Salah satu rekomendasi penting dari hasil Kongres Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) yang digelar tahun 2012 yang lalu di Yogyakarta, seluruh profesi pendidik yang bernaung dalam satu sistem besar pendidikan nasional- termasuk bimbingan dan konseling- menyepakati perlunya penyiapan model pendidikan yang mampu mengakomodasi terjadinya bonus demografis yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang.

c. Perubahan Gaya Hidup Kaum Muda

Gaya hidup dapat didefinisikan sebagai pola penggunaan ruang, waktu, dan barang-barang; bagaimana kelompok sosial tertentu menggunakan ruang, waktu, dan barang dengan pola atau kebiasaan tertentu (Yasraf Amir Piliang, 2004; 60). Perkembangan sains dan teknologi telah merubah gaya hidup di dalam berbagai bidang, seperti dalam bisnis, piknik, belajar, hiburan, seksual, dan

sebagainya (Yasraf Amir Piliang, 2004; 60). Perubahan gaya hidup ini diilustrasikan dengan sangat baik oleh Yasraf Amir Piliang (2004; 78) dengan mencontohkan ritme hidup seorang pelajar SMA yang menghabiskan hampir keseluruhan waktunya untuk menghibur diri, ketimbang memberi waktu lebih banyak untuk belajar, bekerja dan beribadah. Ilustrasi tersebut merupakan lukisan sebuah dunia, yakni dunia hiburan yang menguasai pikiran dan persepsi seseorang. Dalam dunia hiburan, yang *banal* (hiburan) menguasai yang *essensial* (kerja, ibadah, bakti). Dulu hiburan adalah suatu cara untuk melepaskan diri sejenak (*refreshing*) dari kepenatan kerja. Kini, dunia hiburan itu mengambil hampir seluruh energi, waktu, pikiran, dan uang demi kesenangan yang sebentar (Yasraf Amir Piliang, 2004; 79).

Fenomena ekstrem apatisisme kaum muda seperti terlihat pada *mainstream* besar budaya populer yang digandrungi secara taklid buta. Tuntunan hidup kelompok ini adalah gaya hidup serba glamour dan terukur secara material-fisik. Simptom hedonisme ini, bak virus, telah mewabah dan menjangkiti hampir seluruh struktur masyarakat; urban maupun rural, kota dan desa.

Di masa sekarang ini, kita banyak merekam berbagai persoalan mulai dari yang kecil-neurotik sampai dengan masalah yang besar yang mengarah kepada *juvenile delinquency* bahkan kategori psikotik. Sebagai contoh, kita telah sering mendengar cerita tentang tawuran pelajar yang semakin marak dan mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *criminal-delinquent*. Mereka yang terjebak dalam lingkaran permusuhan yang tiada berujung pangkal ini, hanya bisa menakar diri dalam sudut pandang yang sangat egosentris dan menjadikan solidaritas salah kaprah sebagai ajimat sakti untuk menyerang dan menghancurkan sesama mereka sendiri. Begitu pun, mereka yang terperangkap dalam dekapan obat-obatan terlarang merasa dirinya adalah individu yang bebas-merdeka, individu yang merasa bisa lepas dari beban dan kesulitan hidup yang terus membesar dan tak terpecahkan. Mereka mencari media *outlet* (pelepasan) melalui jalan pintas tanpa bisa mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah dari akar yang sebenarnya.

d. Perubahan Teknologi-Informasi yang Paradoksal

Dewasa ini kita telah hidup dalam era teknologi digital, *cyberspace*, dan serba *real-time*. Melalui kecanggihan teknologis tersebut, setiap individu telah terhubung walaupun terpisah secara jarak. Pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi tersebut berdampak signifikan terhadap percepatan akses informasi dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan, sekarang ini penggunaan media elektronik menjadi faktor penentu kesuksesan dalam banyak hal, perdagangan dan transaksi internasional, transportasi modern, sumber-sumber belajar *online*, dan lainnya. Ketidakmampuan adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut diyakini sebagian pihak akan membawa Indonesia dalam keterisolasian dari perkembangan global.

Yasraf Amir Piliang (2004; 65) mengungkapkan bahwa keadaan "terhubungkan" menjadikan setiap individu lebih efisien, lebih cekatan, lebih cepat, lebih produktif, lebih kaya, lebih *update*. Akan tetapi, ironisnya, kecepatan juga membuat mereka merasa lebih sibuk, lebih tegang, lebih tertekan, lebih sensitif, lebih cepat emosional. Inilah paradoks dunia *real-time*; memudahkan sekaligus menegangkan, menyamankan sekaligus membuat panik. Di era *cyberspace* dewasa ini, transmisi data online setiap detik berjumlah triliunan *terabyte*, yang semuanya dapat diakses setiap orang yang terkoneksi. Akan tetapi, di dalam *booming* informasi tersebut, tidak berarti bahwa semua informasi itu berguna dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Kecepatan informasi kadang-kadang tidak sebanding dengan kemampuan manusia dalam menyerapnya (Yasraf Amir Piliang, 2004; 65).

e. Tantangan Pergeseran Nilai dalam Keluarga dan Masyarakat

Komunitas kaum muda memang telah lama kehilangan sumber-sumber pendidikan dan belajar. Keluarga dan rumah yang menjadi basis awal pembentukan identitas diri di mana mereka memperoleh pendidikan dan sumber belajar pertama kali, tampak belum begitu memiliki peran signifikan untuk dijadikan model oleh kaum muda. Begitu pula lembaga sekolah dan masyarakat tak lebih hanya menjadi penjara batin yang selalu mengkebiri daya kreativitas dan daya kritisisme pelajar dan remaja. Terutama di masyarakat, remaja berada dalam situasi kegamangan nilai dan pandangan hidup yang semakin menipis dan pudar termakan teknologi canggih yang kehilangan visi humanitasnya.

Kegagalan transmisi nilai itu lebih disebabkan kekeliruan metodik dalam melakukan pendekatan terhadap kaum muda. Louis Raths, Merrill Harmin, Sidney Simon, dan Krischenbaum dalam tulisan mereka tentang nilai-nilai (Mary Rebecca E. Rogacion dalam *Peer Counseling, A Way of Life, Manila; The Peer Counseling Foundation, 1982*) menyebutkan beberapa kekeliruan cara transmisi nilai, yaitu (1) pendekatan model, (2) pendekatan ganjaran dan hukuman (*reward and punishment*), (3) pendekatan eksplanatorik, (4) pendekatan otoritas, dan (5) pendekatan manipulasi.

Dalam pendekatan model, masalah yang muncul adalah adanya model-model yang saling bertentangan hampir untuk setiap nilai. Keadaan ini menyulitkan usaha mempromosikan nilai-nilai tertentu. Orang yang menggunakan pendekatan ini akan mengajarkan nilai-nilai dengan cara mengamalkan sendiri nilai-nilai tersebut dalam hidup mereka dengan harapan bahwa para murid akan mengikuti jejak mereka. Diasumsikan bahwa para murid mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang mereka tiru dan mampu mencernanya.

Penggunaan sistem ganjaran dan hukuman merupakan salah satu cara dengan mana kita mengendalikan berbagai bentuk tingkah laku. Pendekatan ini mempunyai dampak membuat individu tunduk demi mendapatkan ganjaran

atau menghindari hukuman tertentu. Akibatnya, seseorang hanya mau menunjukkan perilaku tertentu hanya bila ada sanksi-sanksi yang jelas. Bahayanya, tingkah laku yang diharapkan tidak terinternalisasi karena terlalu mementingkan sanksi-sanksi. Keadaan ini dapat menimbulkan kesan bahwa tingkah laku yang diharapkan tersebut memiliki kaitan langsung dengan sanksi-sanksinya. Begitu sanksi dicabut, seseorang akan merasa terbebas dari beban berat dan tingkah laku yang diharapkan pun akan lenyap.

Pendekatan eksplanatorik (penjelasan) seperti model dakwah yang bersifat deklaratif-indoktrinatif akan menimbulkan bahaya bahwa suatu nilai dipraktikkan hanya berdasarkan penjelasan orang lain dan bukan atas dasar keyakinan sendiri. Pendekatan lewat otoritas memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pendekatan eksplanatorik. Anak muda hanya diomeli tentang mana yang benar dan mana yang salah. Tidak peduli apakah individu yang bersangkutan memahami alasan-alasan atas standar yang nilai yang ditetapkan. Asumsinya adalah nilai-nilai dipromosikan berdasarkan otoritas seseorang. Orang-orang banyak yang tidak suka dengan pendekatan ini yang sering digunakan dalam pelajaran dan khutbah keagamaan. Terkadang, bahkan, orang-orang sering muak pada nilai-nilai.

Sementara dalam pendekatan manipulasi, orang berusaha memanipulasikan lingkungan atau pengalaman ke arah nilai-nilai tertentu yang dikehendaki. Kesempatan memilih tidak diberikan, konsekuensi-konsekuensi serta pengalaman diarahkan sedemikian rupa untuk membatasi nilai-nilai yang diharapkan terbentuk. Sebagai contoh adalah larangan membaca buku porno. Lingkungan dikondisikan sedemikian rupa agar tidak bisa ditemukan bahan bacaan porno. Kondisi yang demikian ini hanya akan menyebabkan orang-orang lebih penasaran dan ingin membacanya.

### **PERLUNYA REVOLUSI TERHADAP PRAKSIS BIMBINGAN DAN KONSELING**

Bertitik-tolak dari pemahaman visioner tentang relasi kemanusiaan dengan gerakan-gerakan sosial seperti konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah dapat menjadikan visi tersebut sebagai kerangka filosofis-antropologis-sosiologis yang utuh dalam rangka mendekati anak didik dan mengidentifikasi problematika psikologis yang muncul. Tantangan yang paling mengesankan yang tengah dihadapi oleh petugas bimbingan-konselor di sekolah adalah mendampingi proses tumbuh-kembang anak didik dalam konteks pribadi, sosial, belajar, dan persiapan karir masa depan. Dalam konteks pribadi dan sosial, anak didik yang berada dalam rentang pertumbuhan dan perkembangannya sebagai remaja sedang mengalami konflik psikososial. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Erick Erikson (Hurlcok, 1999) bahwa konflik itu berkaitan langsung dengan perkara pemerolehan identitas diri di satu sisi (*self identity*) dan kebingungan mencari peran yang tepat di sisi lain (*role confusion*).

Beragam eksperimen secara *trial and error* dilakukan kalangan remaja/anak didik untuk memenuhi hasrat mereka akan peran dan identitas diri. Keinginan untuk mencoba-coba hal tertentu pada remaja memang baik, tetapi jika percobaan tersebut dilakukan dalam waktu lama, tanpa hasil akan membahayakan proses perkembangan kepribadiannya. Karenanya diperlukan kehadiran pembimbing dan konselor sekolah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan karakter (*character building*) pada diri anak didik. Intervensi pihak ketiga ini diharapkan dapat memberikan pendidikan psikologis (*psychological education*) kepada para anak didik. Hal ini penting bagi mereka guna mempercepat proses identifikasi diri, tanpa harus mengabaikan segi-segi positif dari perjalanan panjang pencarian identitas.

Dalam konteks belajar dan persiapan karir, kebanyakan anak didik mengalami kesulitan dalam mengembangkan gaya belajar dan tidak mengalami lompatan-lompatan yang berarti dalam hal penguasaan materi. Pendekatan bimbingan belajar yang perlu diuji coba dalam konteks ini adalah dengan menggunakan metode *quantum learning* yang diintroduksi oleh Bobbi de Porter dan Mike Hernacki (1992). Filosofi metode ini berdasar pada teori quantum-nya Einstein ( $E=mc^2$ ). Paralel maknanya dengan *accelerated learning*, *quantum* berarti lompatan atau lompatan. Dalam belajar, seseorang semestinya dapat melakukan lompatan-lompatan yang fantastis untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam *quantum learning*, siswa diajak untuk melibatkan seluruh potensi dan kemampuan diri bahkan dalam batas yang paling maksimal. Seluruh target capaian dalam bimbingan belajar yang menggunakan metode *quantum learning* hendaknya berorientasi tidak hanya pada aspek kognitif namun juga aspek afektif, dan psikomotorik. Potensi penglihatan mereka (*visual*), pendengaran (*auditory*) dan psikomotorik (kinestetik) juga menjadi satu kesatuan yang membentuk visi belajar pada diri siswa. Intinya, metode *quantum learning* mengajak siswa untuk bergerak dinamis, progresif, bergembira dan menikmati apa yang mereka pelajari.

Sementara itu, dalam persiapan karir, akar problem yang muncul pada siswa bukanlah "karir yang seperti apa yang cocok untukku di masa yang akan datang", melainkan lebih mengacu pada tidak terbentuknya sikap kemandirian dan kewirausahaan sejak awal. Oleh karenanya, tujuan paling esensial dari bimbingan karir bagi siswa lebih difokuskan pada pembentukan jiwa mandiri dan kewirausahaan yang merupakan embrio pembentukan karir di masa yang akan datang.

Masyarakat memang telah berubah. Arus besar perubahan tersebut banyak diilhami oleh semangat globalisasi dan informasi yang mengguncang masyarakat dan sekolah, kampus dan tatanan kehidupan dalam segenap seginya. Akibatnya akan semakin banyak individu, anak-anak, dan remaja peserta didik di sekolah serta warga masyarakat lainnya yang dihimpit berbagai tantangan dan ketidakpastian, terlempar dan terhempas oleh berbagai harapan dan keinginan yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, tuntutan pengembangan kedirian secara optimal dari aspek-aspek individualitas, sosialitas, moralitas, dan religiusitas dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya semakin mendapat tantangan.

Tampaknya kita membutuhkan apa yang disebut sebagai revolusi dan transformasi bidang kesehatan mental (Brammer, 1979). Revolusi dan transformasi



kesehatan mental yang dimaksud adalah upaya preventif dan ekstensif menolong warga masyarakat termasuk warga belajar meningkatkan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan pada tingkatan yang semakin tinggi, khususnya lewat penguasaan berbagai keterampilan hidup (*life skills*) bersama, komunikasi antar pribadi, dan pertumbuhan pribadi. Konsep ini belakangan dikenal secara luas sebagai pendidikan psikologis (*psychological education*), bukan pendidikan psikologi (Brammer, 1979). Kata kuncinya adalah *life skills*, yaitu mendengarkan dan memahami secara empatik (*emphatic understanding*), menyampaikan pesan; mengungkapkan pikiran dan perasaan (*self disclosure*), resolusi konflik, membuat perencanaan (*strategic planning*), dan *problem solving*, mengambil keputusan (*decision making*), *coping* terhadap aneka *stressor*, menjalani berbagai transisi hidup dan perkembangan secara berhasil, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah dan perguruan tinggi (Nelson-Johns, 1982).

Dalam rangka itu semua, peran dan fungsi pembimbing dan konselor sebaiknya diperluas, bukan hanya sebagai *support personal* atau *counselor aides* dengan tanggung jawab yang cenderung administratif melainkan disiapkan untuk menjadi konselor dan *trainers* dengan pendekatan individual dan kelompok di bidang *life skills*. Pada kelompok-kelompok sasaran yang mereka layani, para pembimbing dan konselor sekolah juga perlu mempersiapkan *indigenous trainers* dari kalangan siswa (pendekatan konseling sebaya), sehingga kehadiran pembimbing-konselor sekolah yang *well-educated* dapat memiliki *multiplier effect* menuju terbentuknya pribadi dan masyarakat sekolah yang makin sehat, efektif, dan sejahtera.

Gerakan sosial seperti ini perlu didukung oleh organisasi profesi seperti Himpunan Psikologi (HIMPSI) dan Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN; dulu IPBI). Saat ini, secara diam-diam, layanan konseling menjadi medan persaingan dua organisasi profesi tersebut. Conny Semiawan, guru besar psikologi konseling Universitas Negeri Jakarta, bahkan menggambarkan persaingan tersebut dengan istilah "saling injak kaki". Hingga saat ini tidak ada yang tahu persaingan itu akan semakin terbuka-tajam atautkah akan diubah menjadi sinergi manakala masing-masing organisasi profesi tersebut menjadi semakin rapi dan solid kelak. Paling tidak, kedua organisasi profesi tersebut perlu mendukung sosialisasi layanan konseling dengan menyelenggarakan program-program *training for trainers* dalam berbagai tingkatan keterampilan dan dapat bekerja sama dengan kalangan *volunteer* sosial di masyarakat untuk mengkoordinasikan supervisi dan evaluasi *performance* pada petugas di lapangan. Dengan cara ini, kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mengentaskan, atau paling tidak mereduksi masyarakat kita dan masyarakat sekolah pada khususnya dari krisis menuju kehidupan baru yang lebih baik.

## **PENUTUP**

Dua catatan menarik yang dikemukakan oleh Dedi Supriadi (2004; 225) terkait perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika menarik untuk dijadikan kesimpulan akhir dari tulisan ini. *Pertama*, komunitas ilmuwan selalu memainkan peran strategis dalam perkembangan bimbingan dan konseling. Mereka mampu menangkap

kecenderungan yang berlangsung dalam masyarakat, kemudian mengabstraksikannya, mengkristalisasinya, dan kemudian merumuskannya dalam bentuk teori, pendekatan, strategi, atau proposisi mengenai konseling. Proses pematangan profesi konseling –seperti halnya profesi bantuan lainnya– selalu berlangsung dalam konteks perubahan, kebutuhan, dan pemenuhannya. Dengan demikian, apa yang mereka lakukan dalam konteks profesinya senantiasa terikat secara sosial (*socially bound*) dan relevan dengan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. *Kedua*, dinamika perkembangan bimbingan dan konseling sejak awal sampai tumbuh menjadi suatu profesi selalu bergerak dari bawah ke atas, yakni dari inisiatif yang berkembang dalam masyarakat dan sekolah menuju *national concern*. Pengakuan dari pemerintah datang belakangan setelah mereka membuktikan penampilannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blocher, Donald H. (1974). *Developmental Counseling*, New York: John Wiley and Sons
- Brammer, L. M. (1979). *The Helping Relationships. Process and Skills*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Brown, D. & Trusty, J. (2005). *Designing and Leading Comprehensive School Counseling Programs; Promoting Student Competence and Meeting Student Needs*, Victoria-Australia: Thomson Learning
- De Porter, Bobbi & Hernacki, Mike. (1992). *Quantum Learning; Unleash The Genius Within You*, London: Judy Piatkus Publishers, Ltd.
- Dedi Supriadi. (2004). *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan; In Memoriam Prof. Dedi Supriadi* (Editor; Rohmat Mulyana), Bandung: Penerbit Rosdakarya
- Dell Orto, A. E., & Marinelli, R. P. (1995). *Encyclopedia of Disability and Rehabilitation* (Eds.), New York: Simon & Schuster and Prentice Hall International
- Fathur Rahman. (2005). *Voluntarisme Sosial; Agenda Kerja Konseling Advokatif dalam Mengatasi Problem Ketidakseimbangan Sosial, Paper*. Dipresentasikan pada Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Semarang 13-16 April 2005
- Fathur Rahman. (2009). *Reformasi Sekolah dan BK Komprehensif dalam Tinjauan Sejarah. Makalah*. Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling 20 November 2009 diselenggarakan oleh HIMA PPB FIP UNY
- Galassi, J. P. & Akos, P. (2004). *Developmental Advocacy: Twenty-First Century School Counseling*, *Journal of Counseling and Development*, Vol. 82, 2004, p. 146-157
- Gysbers, N. C. & Henderson, P. (2006). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria: American Counseling Association
- H. A. R. Tilaar. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Hurlock, Elizabeth B. (1999). *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Kehidupan*. Jakarta: PT. Gramedia Utama
- Kiselica, M. S., & Robinson, M. (2001). Bringing Advocacy Counseling to Life; The History, Issues, and Human Dramas of Social Justice Work in Counseling. *Journal of Counseling and Development*, Vol. 79, Fall 2001, p. 387-397
- Nelson-Jones, R. (1982). *The Theory and Practice of Counseling Psychology*. London: Holt, Rinehart & Winston
- O'Brien, Karen M. (2001). The Legacy of Parsons: Career Counselors and Vocational Psychologists as Agents of Social Change, *The Career Development Quarterly*, September 2001; 50/1, ProQuest, p. 66-76
- Orford, J. (1992). *Community Psychology; Theory and Practice*. Chicester: John Wiley and Sons
- Pope, Mark & Sveinsdottir, Maria. (2005). Frank, We Hardly Knew Ye: The Very Personal Side of Frank Parsons, *Journal of Counseling and Development*, 2005, 83/1; ProQuest, p. 105-115
- Sunaryo Kartadinata (2012). Memantapkan Karakter Bangsa Menuju Generasi 2045: Sistem Pendidikan yang Memungkinkan Dihasilkannya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten untuk Mempersiapkan Generasi 2045 dalam *Buku Makalah KONASPI VII 2012*, Yogyakarta: UNY Press
- Yasraf Amir Piliang. (2004). *Dunia yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*, Bandung: Jelasutra
- Yusuf Gunawan. (2001). *Pengantar Bimbingan dan Konseling; Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prehallindo
- Zaenal Abidin. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang, SALAM; *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15/2 Desember 2012, hal. 197-214